

**EVALUASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA PLUS TERINTEGRASI
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA
DANAU PULAI INDAH KECAMATAN KEMPAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019-2020**

Oleh : Sesih Sugesti

Email: sesih.sugesti16@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The existence of the Desa Maju Inhil Jaya Plus Integrated Program with the sub program 1 Village 1 BUM Desa shows that every village in Indragiri Hilir Regency is required to have a BUM Desa. The phenomenon is that the society has difficulty in finding and developing the potential of the village, the lack of commitment of the parties who cooperate in the implementation of BUM Desa, and difficulties in marketing products that have been produced by the village community.

This study uses the evaluation theory proposed by William N Dunn. Evaluation is concerned with the production of information about the benefits from the results of a policy or program outcome. The indicators are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Which method used in this research is qualitative. The type of research is descriptive qualitative research. The research location is in Indragiri Hilir Regency and Danau Pulai Indah Village.

The results showed that the Desa Maju Inhil Jaya Plus Integrated Program is the Regent's flagship program for the 2018-2023 period with the focus is on improving the rural economy through BUM Desa as the axis. Desa Maju Inhil Jaya Plus Integrated Program has not yet been able to achieve the goals. This program can be said to be right with the aim of boosting the rural economy through BUM Desa. However, it still has obstacles such as human resources who are less willing to move, BUM Desa managers who are less active and even inactive and marketing of derivative products are still limited.

Keywords: Effectiveness and Efficiency, Adequacy and Equity, Responsiveness and Accuracy

A. PENDAHULUAN

Kegagalan Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata menjadi alasan diberikannya kewenangan kepada daerah agar dapat mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah yang terdiri dari Desa-Desa. Kewenangan ini sering disebut dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Otonomi Daerah menjadikan daerah memiliki hak untuk mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri, tentunya sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Pemerintah Daerah telah banyak melakukan terobosan-terobosan atau pengembangan program untuk meningkatkan dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Di antara program terobosan tersebut, ada program yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari Pemerintah Daerah. Program tersebut secara keseluruhan berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat yang lebih layak dan bermartabat².

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong gerakannya ekonomi Desa yakni melalui kewirausahaan Desa, kemudian kewirausahaan Desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan Desa ini dapat di wadah dalam Badan Usaha

Milik Desa (BUM Desa) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun Masyarakat Desa³.

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari dari berbagai suku. Indragiri Hilir terdiri atas 20 Kecamatan, 197 Desa dan 38 Kelurahan. Terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Jembatan”. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani kelapa, sesuai dengan julukan untuk “Hampanan Kelapa Dunia”.

Untuk meningkatkan perekonomian Desa, maka Pemerintah Daerah Indragiri Hilir membuat Program Pendirian BUM Desa untuk setiap Desa se-Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa⁴:

Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. Inisiatif Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau Masyarakat Desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. Sumberdaya alam di Desa;

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Elfindri,dkk. 2008. *Strategi Sukses Membangun Daerah*. Jakarta : Gorga Media. Hal 54

³ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. 2016. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat PeDesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul,

Yogyakarta”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016 ISSN 0852-1875

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan; dan/atau
- f. Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam pasal 2 disebutkan ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi ⁵:

- a. Administrasi keuangan BUM Desa;
- b. Pedoman umum dan petunjuk teknis unit BUM Desa;
- c. Alokasi hasil usaha;
- d. Pemberian insentif;
- e. Pendamping Desa

Bupati Indragiri Hilir mengungkapkan fokus pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi adalah pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan. Bupati mengharuskan setiap Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)⁶. Hal ini dimaksudkan agar BUM Desa mampu memberikan kontribusi lebih terhadap peningkatan ekonomi Desa dan kualitas hidup masyarakat Desa. Untuk memastikan pembentukan BUM Desa tersebut, Bupati Indragiri Hilir mengintruksikan langsung lewat Surat Edaran (SE) tertanggal 10 Juli 2018 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hilir untuk

bersama-sama mewujudkan keberadaan BUM Desa⁷.

Setelah secara resmi meluncurkan program DMIJ Plus Terintegrasi pada tahun 2018, Bupati Indragiri Hilir mengungkapkan telah mempersiapkan berbagai terobosan dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi. Program ini merupakan program unggulan dari Bupati Indragiri Hilir yang fokusnya adalah pengembangan ekonomi masyarakat Desa. Program ini melibatkan seluruh instansi yang ada sehingga DMIJ Plus Terintegrasi ini dapat diintegrasikan di sektor pemerintahan. Sehingga apa saja yang menjadi kebutuhan dinas dapat difasilitasi oleh program DMIJ Plus Terintegrasi ini.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah Desa bersama pihak-pihak yang bekerjasama untuk mengelola BUM Desa seharusnya memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa melalui BUM Desa. Namun, kenyataan di lapangan kurang sesuai dikarenakan masih banyaknya Desa yang kesulitan dalam mengembangkan atau menggali potensi desa. Faktor lainnya adalah banyaknya pihak yang tidak komitmen dalam pelaksanaan operasional BUM Desa, sehingga meninggalkan tugas begitu saja.

Sulitnya memasarkan produk turunan kelapa juga menjadi kendala pada saat ini. Untuk itu diharapkan BUM Desa dapat bekerjasama dengan PT. Kelapa Inhil Gemilang yang merupakan perusahaan milik daerah untuk dapat memasarkan produk sehingga dapat

⁵ Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

⁶ Halloriau.com. "Bupati Inhil Ungkap Fokus Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah Pengembangan Ekonomi". 3 Januari 2019 Akses 8 September

2020(<https://www.halloriau.com/read-inhil-109390-2019-01-03-bupati-inhil-ungkap-fokus-program-dmij-plus-terintegrasiadalah-pengembangan-ekonomi.html>)

⁷Riaupotenza.com. "Desa di Inhil Menuju Desa Mandiri". 26 Juli 2018 akses 8 September2020. (<http://riaupotenza.com/berita/20323/desa-di-inhil--menuju-desamandiri>)

membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintahan daerah sangat dituntut untuk dapat mengatasi dan memperbaiki ekonomi di kawasan pedesaan. Untuk itu, terobosan yang dilakukan dalam periode ini berupa program unggulan yaitu Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di dalamnya memuat beberapa sub program.

Tabel 1.
Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Program	Sub Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi
1.	Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi	- Magrib Mengaji - 1 Desa 1 Rumah Tahfizh - 1 Desa 1 BUM Desa - 1 Desa 1 PAUD - dan lain-lain;

Sumber : Fasilitator DMIJ Plus Terintegrasi, 2020

Di antara sub program tersebut, yang menjadi program unggulan adalah program 1 Desa 1 BUM Desa yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah harga kelapa. Di sisi penjualan produk, BUM Desa juga diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah pengolahan kelapa menjadi barang jadi dengan memberdayakan masyarakat petani sebagai tenaga operasional terlatih, serta menggali potensi lainnya yang dimiliki Desa untuk dapat dikembangkan bersama.

Untuk itu, penelitian ini lebih fokus terhadap evaluasi Program DMIJ Plus Terintegrasi melalui BUM Desa. Peneliti memilih Desa Danau Pulai

Indah Kecamatan Kempas untuk mengukur tingkat ketercapaian program DMIJ Plus Terintegrasi.

Setelah melakukan observasi lapangan, peneliti menyimpulkan ada beberapa masalah dalam program ini, yaitu :

1. Masyarakat masih kesulitan mengembangkan potensi Desa masing-masing
2. Sulitnya memasarkan produk turunan yang dibuat oleh BUM Desa
3. Kurangnya komitmen dari pihak-pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan BUM Desa
4. Pengelola BUM Desa masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, terkait pentingnya peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian di kawasan pedesaan , maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu : ***“Evaluasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi melalui Badan Usaha Milik Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020”***.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi melalui Badan Usaha Milik Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2020?

C. KERANGKA TEORI

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian

kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan⁸. James P. Lester dan Joseph Steward, Jr mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi:

1. Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi
2. Evaluasi Impak, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki
4. Evaluasi meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan- kesamaan tertentu

Menurut William N. Dunn istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya memiliki nilai, hal ini karena hasil tersebut

memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Indikator-indikator evaluasi menurut William N. Dunn sebagai berikut⁹:

1. Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sininim dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha yang umumnya diukur dengan ongkos moneter.

3. Kecukupan (*adequacy*)

William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

4. Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik adalah sama.

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Kriteria responsivitas menjadi penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari

⁸ Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta: MedPress. Hal 226

⁹ William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 429-439

kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan suatu program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan ini digunakan untuk melihat hasil dari kebijakan yang sudah ditetapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat atau tidak.

D. METODE PENELITIAN

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, mengidentifikasi, dan menganalisa data sehingga memperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Penelitian ini berlokasi Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Menetapkan kawasan ini sebagai lokasi sekaligus objek penelitian. Alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan seluruh Desa wajib mendirikan dan mengembangkan BUM Desa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir.

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kasi Pengembangan Kelembagaan dan UED Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indragiri Hilir	1
2.	Leader DMIJ Plus Terintegrasi	1
3.	Spesialis BUM Desa dan Pengembangan Ekonomi Program DMIJ Plus Terintegrasi	1

4.	Kepala Desa Danau Pulai Indah	1
5.	Pengelola BUM Desa Sumber Makmur Desa Danau Pulai Indah	2
6.	Masyarakat	1
Jumlah		7

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi

Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi ini adalah lanjutan dari program unggulan Bupati periode sebelumnya yaitu Desa Maju Inhil Jaya yang direalisasikan dari tahun 2013-2018 dengan fokusnya adalah pembangunan infrastruktur. Untuk periode 2018-2023, nama program ini masih sama. Namun, ada tambahan kata Plus Terintegrasi di belakangnya. Dalam hal ini, semua instansi dinas yang ada di Indragiri Hilir berperan penting untuk tercapainya tujuan dari Program DMIJ-PT yang fokusnya adalah pengembangan ekonomi masyarakat.

Adanya BUM Desa untuk 197 Desa di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi suatu keharusan yang disampaikan Bupati Indragiri Hilir dalam Surat Edaran mengenai kewajiban pendirian BUM Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa harus menggali potensi yang ada di Desa dan mengembangkan unit usaha yang sudah ada di Desa. Namun, masih ada Desa yang kesulitan dalam menentukan usaha yang potensial sehingga ada beberapa BUM Desa yang unit usahanya tidak berjalan.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa se-Kabupaten Indragiri Hilir ini sudah terlaksana dan pada saat ini seluruh Desa sudah memiliki BUM Desa untuk mengelola potensi Desa masing-masing. Hal ini sesuai dengan

wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yusni Azizah, SE selaku Fasilitator Kabupaten Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi, yakni sebagai berikut :

“Pada tahun 2019 dengan adanya program DMIJ Plus Terintegrasi, Bupati berharap dengan adanya program ini dapat memfasilitasi berdirinya BUM Desa di setiap Desa. Itulah menjadi program unggulan Bupati dengan 1 Desa 1 BUM Desa. Untuk itu kita bergerak bersama-sama untuk BUM Desa ini berdiri dan rampung di 2019. Alhamdulillah pada Juli 2019, BUM Desa berdiri dengan administrasinya tuntas. Sebelumnya BUM Desa di 119 Desa yang sudah berdiri tetapi administrasinya belum lengkap maka kita lengkapi, pengelola tidak aktif juga kita ganti melalui musyawarah”. (Wawancara bersama Fasilitator Kabupaten Spesialis BUM Desa Program DMIJ-PT pada 25 Agustus 2020)

Hal tersebut dijelaskan pula oleh Bapak Khairul Hasbi, SE selaku Kasi Kelembagaan dan UED Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

“Saat ini, semua Desa sudah punya BUM Desa. Tetapi ada juga beberapa Desa yang BUM Desanya ada tetapi unit usahanya tidak berjalan. Saat ini Inhil ada 197 Desa berarti kita ada 197 BUM Desa. BUM Desa juga punya kategori atau klasifikasi juga seperti berkembang, tidak aktif, maju. Alasan unit usaha ini tidak berjalan adalah sudah pernah mencoba sebelumnya namun gagal”. (Wawancara bersama Kasi Kelembagaan dan UED Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada 18 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari aspek pendirian BUM Desa sebelum adanya Program Desa Maju Inhil Jaya

Plus Terintegrasi sudah ada 119 BUM Desa yang berdiri. Namun administrasinya kurang lengkap. Dalam aspek pendirian, sudah terlaksana dan berhasil efektif karena saat ini seluruh Desa di Kabupaten Indragiri Hilir sudah memiliki BUM Desa. Begitu pula dengan seluruh rangkaian administrasi yang juga sudah lengkap dan rampung seluruhnya pada tahun 2019. Namun, dari segi operasional unit usaha masih belum bisa dikatakan efektif.

Karena masih ada beberapa Desa yang gagal dalam menjalankan unit usahanya walaupun penyertaan modal dan uang BUM Desanya masih ada, tetapi masyarakat atau pengelola sendiri kebingungan untuk membuka usaha baru dan memutuskan untuk tidak melanjutkan unit usaha yang lama karena faktor kegagalan tersebut. Sehingga BUM Desa hanya berdiri saja namun kegiatan operasionalnya tidak ada atau tidak berjalan.

3.2 Efisiensi dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi

Hal yang paling utama dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi penggunaan Alokasi Dana Desa, DBH pajak dan retribusi serta bantuan keuangan yang menyentuh kebutuhan dasar Desa. Sehingga dana yang disalurkan dapat digunakan secara layak dan semestinya untuk kepentingan Desa termasuk BUM Desa.

Pendirian BUM Desa se-Kabupaten Indragiri Hilir difokuskan pada tahun 2018 sampai 2019 dengan administrasi yang juga sudah rampung sehingga bisa di katakan efisien waktunya, Badan Usaha Milik Desa Danau Pulaui indah yang bernama BUM Desa Sumber Makmur membuat usaha wisata kolam renang untuk anak-anak yang didirikan pada tahun 2019.

Penyertaan modal yang di dapat dari Bankeu Provinsi Riau tahun 2019 adalah sebesar Rp 153.000.000. Dana ini dimanfaatkan untuk membuat destinasi wisata berupa kolam renang untuk anak-anak yang bertempat di Komplek perkantoran Desa Danau Pulai Indah. Pada tahun 2020, penyertaan modal untuk BUM Desa di dapat sebesar Rp 62.500.000. Tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pengurus BUM Desa untuk mengelola uang tersebut.

Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen dari pengurus BUM Desa yang pada saat ini hanya tersisa 2 orang saja yakni sekretaris dan Bendahara BUM Desa sehingga sulit untuk mengelola kembali unit usaha yang lama seperti unit jasa keuangan dan unit wisata. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Andi Asnizar, S. IP. selaku Kepala Desa Danau Pulai Indah, mengatakan bahwa :

“Permasalahan untuk BUM Desa Sumber Makmur saat ini adalah belum bisa membuka unit usaha baru dikarenakan Direktur BUM Desa sendiri jarang untuk bermusyawarah atau melaksanakan pertemuan untuk membahas terkait BUM Desa ini. Apa selanjutnya yang akan dibuat karena usaha sebelumnya belum bisa kita lanjutkan., Karena usaha kolam renang ini tidak bisa berjalan, maka apa usaha lain yang bisa kita buat mumpung adanya permodalan yang kita dapat ini. Tentunya harus ada kerjasama antara Pemerintah Desa dengan pengelola BUM Desanya juga.” (Hasil wawancara bersama Kepala Desa Danau Pulai Indah pada 7 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kurangnya komitmen dari pengurus BUM Desa dalam menjalankan dan mengembangkan unit usaha yang ada di BUM Desa. Karena Direktur tidak bergerak, bawahannya juga bingung

akan melakukan apa. Padahal ada modal, namun tidak digunakan sehingga tidak adanya pemasukan. BUM Desa Sumber Makmur ini memiliki usaha wisata kolam renang namun tidak bisa berjalan semenjak *Covid-19* melanda. Untuk itu perlu adanya pembukaan unit usaha baru agar operasional BUM Desanya tetap berjalan.

3.3 Perataan dalam Pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi

Untuk pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditinjau langsung bagi Desa yang terjangkau atau Desa yang dapat ditempuh dengan transportasi darat saja. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Khairul Hasbi, SE selaku Kasi Pengembangan dan UED DPMD Indragiri Hilir, yakni : *“ Kalau untuk pembinaan ke BUM Desa itu ada kami lakukan. Namun, tidak bisa menjangkau semua Desa. Kami fokuskan kepada BUM Desa yang memiliki masalah seperti unit usaha yang tidak jalan atau pengurus yang banyak mengundurkan diri sehingga diberikan pembinaan dan dicari jalan keluarnya. Tentunya lain Desa, lain pula potensinya. Beda Desa, beda pula permasalahan yang dihadapi. Jadi, tidak semua Desa kami datangi atau kami tinjau langsunglah bahasanya, turun ke lokasi langsung. Karena anggaran untuk turun ke Desa itu tidak ada. Jadi, bagi Desa yang memiliki masalah, Kami tetap melakukan pembinaan walaupun tidak secara langsung. Kami beri pembinaan melalui surat yang ditujukan ke BUM Desa yang bersangkutan”*. (Wawancara bersama Kasi Pengembangan dan UED DPMD pada 18 Juni 2021)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk pembinaan secara langsung itu belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran. Namun, secara tidak langsung

Desa yang memiliki masalah juga mendapatkan pembinaan walaupun hanya melalui surat saja. Hal ini juga dikarenakan kondisi geografis Indragiri hilir yang dipisahkan oleh laut.

Untuk pelatihan, DMIJ Plus Terintegrasi siap memfasilitasi apapun yang dibutuhkan oleh Desa terkait dengan sosialisasi ataupun pelatihan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yusni Azizah, SE selaku Fasilitator Kabupaten Spesialis BUM Desa dan Pembangunan Ekonomi Program DMIJ Plus Terintegrasi, yakni :

“ Kalau untuk pelatihan itu disesuaikan dengan kebutuhan Desa, dan dilihat potensi desanya karena masing-masing Desa berbeda potensi wisatanya. Memang saat ini Indragiri Hilir dikenal dengan potensi kelapa yang besar. Namun, tidak semua Desa punya kelapa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Desanya. Kami akan bantu untuk memfasilitasi kebutuhan dari Desa. Misalnya, Desa A memiliki potensi perkebunan kelapa dan pengelola BUM Desa atau Pemerintah Desanya meminta untuk diadakannya sosialisasi atau pelatihan terkait pengelolaan produk turunan kelapa. Maka, kami dari DMIJ Plus Terintegrasi akan memfasilitasi itu dan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan misalnya. Di situlah juga letak makna dari kata Integrasi ini.”

(Hasil wawancara bersama Fasilitator Kabupaten Spesialis BUM Desa dan Pembangunan Ekonomi Program DMIJ Plus Terintegrasi pada 8 Oktober 2021)

DMIJ Plus Terintegrasi selalu berusaha membantu untuk memfasilitasi apapun yang menjadi kebutuhan Desa. Dalam bidang apapun DMIJ Plus Terintegrasi akan selalu berusaha untuk membantu dan memfasilitasi baik di sektor perkebunan, pertanian, wisata, dan sebagainya.

3.4 Kecukupan dalam Pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan dirasakan ketika BUM Desa menjalankan unit usaha dan mengembangkannya. Untuk itu apa yang sudah dibuat oleh masyarakat dapat dibantu pemasarannya oleh BUM Desa yang bekerjasama dengan PT. KIG(Kelapa Inhil Gemilang). Saat ini, Program ini dirasa belum cukup untuk membantu pengembangan BUM Desa. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yusni Azizah, SE selaku Fasilitator Kabupaten Spesialis BUM Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi, yakni :

“masyarakat Desa kebingungan untuk memasarkan produk kelapanya, seperti kelapa yang diolah menjadi minyak goreng atau VCO. Atau batok kelapanya dibuat menjadi arang. Desa bisa melakukan ini tapi tidak bisa menjual. Produk yang dijual keluar itu kan juga mempunyai standar yang harus dipenuhi, nah standar itu yang kadang tidak bisa dipenuhi oleh BUM Desa kita. Kita sangat berharap adanya peran pemerintah untuk mengusahakan produk turunan yang dibuat oleh BUM Desa ini bisa laku di pasaran dengan standar yang diterima masyarakat luar. Kita berharap dengan adanya PT.KIG, produk turunan kelapa ini bisa dijual. Jadi, kita yang menyiapkan produknya, PT. KIG yang dari pemerintah bisa membantu untuk memasarkan. Kami berharap seperti itu” (Hasil wawancara bersama Fasilitator Kabupaten Spesialis BUM Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi pada 25 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa hingga saat ini masyarakat kesulitan untuk memasarkan produk turunan yang mereka buat. Sejauh ini PT. KIG selaku Badan Usaha Milik Desa juga belum bisa membantu dalam pemasaran produk turunan kelapa yang dibuat oleh masyarakat. Tingginya standar pemasaran juga menjadi kendala dalam

pemasaran. Sudah pernah ada yang ingin bekerjasama membeli produk turunan kelapa, namun setelah MOU ditandatangani ternyata produk turunan yang dibuat masyarakat Desa belum bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Syaifuddin, MM selaku Leader program DMIJ Plus Terintegrasi, yakni :

“Kemarin sudah kami koordinasikan dengan PT. Kelapa Inhil Gemilang terkait pemasaran produk ini. Pihak PT. KIG nya juga sudah sosialisasi ke sini membicarakan terkait penjualan produk yang dihasilkan masyarakat desa. Namun, belum ada tindak lanjut dari Badan Usaha Milik Daerah ini. Jadi sekarang ini ya begitulah adanya. PT. KIG juga belum bisa berkontribusi untuk pemasaran BUM Desa ini.” (Hasil wawancara bersama Leader Program DMIJ Plus Terintegrasi pada 22 Juni 2021)

3.5 Responsivitas terkait Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi

BUM Desa Sumber Makmur Desa Danau Pulai Indah dalam membangun masyarakat berupaya memberdayakan masyarakat sendiri dengan pendekatan operasional menuju masyarakat Desa Danau Pulai Indah yang sejahtera, yaitu dengan upaya pengembangan Desa wisata. Untuk tahap awal ini hanya dapat membuat 1 buah kolam renang dengan harapan, masyarakat dapat memanfaatkan lokasi untuk bisa berjualan di sekitar lokasi wisata, sehingga diharapkan masyarakat Danau Pulai Indah dapat meningkatkan perekonomian yang maju, berjaya, dan sejahtera. Berikut adalah hasil wawancara bersama Kak Eka Suryani, SP selaku sekretaris BUM Desa Sumber Makmur Danau Pulai Indah, yakni :

“ masyarakat sangat terbantu dengan adanya kolam renang ini, disitulah

tambahan untuk masyarakat. Seperti jualan minuman, atau makanan ringan dan berat di sepanjang area kolam ini. Lumayan besar pendapatan mereka, karena memang awal dibukanya kolam renang ini peminatnya banyak,. Untuk itu kami membuka setiap hari kolam renang ini. Kalau untuk tarifnya hari biasa itu lima ribu tetapi kalau hari minggu sepuluh ribu. Untuk masyarakat yang berjualan di sepanjang area kolam juga wajib membayar ke BUM Desa sebesar lima ribu rupiah per harinya“. (Wawancara bersama sekretaris BUM Desa Sumber Makmur Danau Pulai Indah pada 7 Juli 2021)

Dengan adanya BUM Desa di Desa Danau Pulai Indah ini pemenuhan kebutuhan di masyarakat tercukupi dan memiliki dampak yang besar untuk masyarakat Desa. Dengan adanya unit usaha kolam renang untuk anak-anak yang bertempat di belakang kantor Desa Danau Pulai Indah menjadikan sumber pendapatan bagi warga setempat untuk berjualan di sepanjang area kolam renang. Hal ini menjadikan masyarakat memiliki pendapatan diluar pekerjaan pokok mereka, atau bagi masyarakat yang tidak bekerja dapat memanfaatkan lokasi sekitar kolam untuk mendapatkan penghasilan.

BUM Desa Sumber Makmur adalah salah satu BUM Desa yang dikategorikan BUM Desa berkembang dan Pemerintah Desanya sangat mendukung kegiatan BUM Desa. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yusni Azizah selaku Fasilitator Kabupaten Spesialis BUM Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi, yakni :

“BUM Desa Sumber Makmur Desa Danau Pulai Indah ini merupakan BUM Desa yang berkembang dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Desanya. Sehingga perkembangannya pesat apalagi ditambah dengan potensi yang ada di Desanya.” (Hasil

wawancara bersama Fasilitator Kabupaten Spesialis BUM Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi pada 8 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa Perkembangan BUM Desa Sumber Makmur tergolong cepat. Pemerintah Desa Danau Pulai Indah mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan BUM Desa. Hal ini menjadikan pengelola BUM Desa semangat dalam menjalankan unit usaha yang ada. BUM Desa akan berjalan maksimal jika adanya dukungan dari Pemerintah Desa begitu juga sebaliknya.

Dengan adanya unit usaha ini, masyarakat Desa juga terbantu dengan disediakannya tempat untuk berjualan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Loge Selaku salah satu masyarakat Desa yang berjualan di area kolam renang, yakni :

“ Alhamdulillah ya lumayan besarlah pendapatan perharinya. Adalah sekitar 150 ribuan atau lebih kalau lagi ramai pengunjung. Apalagi awal-awal kolam dibuka itu memang penuh di sini. Meskipun hanya jualan pop mie, minuman dingin, dan makanan ringan tapi keuntungannya lumayan daripada duduk diam di rumah.” (Hasil wawancara bersama Ibu Loge selaku masyarakat yang berjualan di area kolam renang pada 7 Oktober 2021)

Jika BUM Desa benar-benar berjalan, maka masyarakat juga akan merasakan dampaknya. Seperti di BUM Desa Sumber Makmur yang masyarakatnya terbantu dengan adanya BUM Desa ini. Masyarakat yang berjualan di sekitar area kolam bisa mendapatkan uang 100.000 sampai 150.000 jika ramai pengunjung. Pungutan pajak yang diminta oleh BUM Desa pun tidak banyak, hanya 5000 rupiah perwarung.

3.6 Ketepatan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan program, dari penjelasan informan dapat diketahui bahwa pada dasarnya Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi dalam pengembangan BUM Desa ini merupakan salah satu pilihan yang cukup tepat dalam meningkatkan ekonomi pedesaan yang menjadikan BUM Desa sebagai porosnya.

Untuk kegiatan operasional di Desa ataupun unit usaha yang di jalankan oleh BUM Desa diserahkan ke Desa masing-masing untuk menggali dan mengembangkan potensi Desa. Sama halnya dengan BUM Desa Sumber Makmur Danau Pulai Indah yang memilih unit usaha wisata dan unit jasa keuangan untuk dikembangkan. Berikut hasil wawancara bersama kak Eka Suryani, SP. selaku sekretaris BUM Desa Sumber Makmur Danau Pulai Indah, yakni:

“Pada saat kolam renang ini sudah jadi, kan diadakan peresmian. Untuk peresmian kola mini sendiri, langsung mendatangkan Pak Bupati dan langsung membuka secara simbolis kolam renang ini. Setelah itu baru besoknya kita langsung buka unit usaha ini dan sangat ramai pengunjung yang datang. Begitupula dengan masyarakat yang berjualan di sepanjang area ini. Pak Bupati sangat senang dengan adanya wisata ini apalagi ini di naungi oleh BUM Desa yang menjadi fokus pak Bupati sendiri kami juga merasa senang atas sambutan yang diberikan oleh Beliau ”. (Wawancara bersama Sekretaris BUM Desa Sumber Makmur Danau Pulai Indah pada 7 Juli 2021)

Unit usaha wisata Desa kolam renang yang diberi nama Buah Berlayar di resmikan pada tahun 2019. Acara ini dihadiri dan diresmikan langsung oleh Bapak HM. Wardan selaku Bupati

Indragiri Hilir. Bupati merasa senang dan bangga terhadap pencapaian Desa Danau Pulai Indah untuk mengembangkan Potensi Desa melalui BUM Desa Sumber Makmur. Bupati menilai Desa danau Pulai Indah ini merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki sarana olahraga yang cukup lengkap.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis yang dijelaskan pada BAB III hasil penelitian dan pembahasan, yang berkaitan dengan Evaluasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi melalui Badan Usaha Milik Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2020. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir belum dapat sepenuhnya mencapai tujuan dari indikator teori William N Dunn yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan.

2. Saran

Setelah dilakukan analisis dan sudah mendapatkan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih dan masukan agar kedepannya lebih baik. Adapun saran yang penulis berikan yaitu :

1. Pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi ini kedepannya harus lebih banyak memperhatikan BUM Desa. Melihat tujuan dari program ini yang menjadikan BUM Desa sebagai pusat ekonomi Desa. Memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait untuk mengelola unit usaha Desa yang

bekerjasama dengan Dinas-dinas terkait.

2. Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi kembali dengan Badan Usaha Milik Daerah yakni PT. KIG (Kelapa Inhil Gemilang) untuk bisa membantu dalam hal pemasaran produk yang dibuat oleh masyarakat.
3. Diharapkan Pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa terus menggali potensi yang ada di Desa. Agar ketika unit usaha yang ada tidak bisa berjalan, maka ada unit usaha lain yang bisa dijalankan sehingga BUM Desa tetap memiliki operasioal di dalamnya untuk menambah pemasukan untuk Desa. Seperti Desa Danau Pulai Indah, yang memiliki unit usaha wisata namun tidak bisa dilanjutkan karena situasi masih belum memungkinkan untuk dibuka kembali wisata tersebut.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri 2016. *“Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta”*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016 ISSN 0852-1875
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elfindri,dkk. 2008. *Strategi Sukses Membangun Daerah*. Jakarta : Gorga Media.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan

- dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pendirian dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor
32 Tahun 2018 Tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pendirian dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3
Tahun 2019 Tentang Program
Desa Maju Inhil Jaya Plus
Terintegrasi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik
: Teori dan Proses*. Jakarta:
MedPress.
- Halloriatu.com. “Bupati Inhil Ungkap Fokus
Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah
Pengembangan Ekonomi”.. 3 Januari
2019 Akses 8 September
2020(<https://www.halloriatu.com/read-inhil-109390-2019-01-03-bupati-inhil-ungkap-fokus-program-dmij-plus-terintegrasiadalah-pengembangan-ekonomi.html>)
- Riaupotenza.com. “Desa di Inhil Menuju
Desa Mandiri”. 26 Juli 2018 akses
8
September2020.(<http://riapotentza.com/berita/20323/desa-di-inhil--menuju-desamandiri>)